ARTIKEL TERBARU JANUARI-FEBRUARI 2021
Artikel di Koran Sindo 21 Januari 2021

OPINI

Tajuk

Menanti Sihir Joe Biden

Mata dunia tertuju ke Washington DC, ibu kota Amerika Serikat (AS). Meskipun diwarnai beragam drama, akhirnya Presiden AS terpilih Joe Biden dilantik menjadi presiden ke-46 di Negeri Paman Sam itu. Tugas berat menanti *Sleepy Joe*, begitu sapaan Donal Trump saat debat Pilpres AS yang digelar November 2020 silam. Selain mengatasi pandemi korona (Covid-19) yang masih mengganas di negaranya, Biden harus memperkuat fondasi perekonomian negara adidaya itu yang hampir lulih lantak karena Covid-19.

Salah satu yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa yang selama ini dikenal sebagai negara penyokong AS dalam kebijakan perekonomian dunia. Memang Joe Biden menjanjikan dana pemulihan ekonomi terbesar sepanjang sejarah AS, yakni USD 1,9 triliun. Nilai itu masih ditambah sebesar USD2 triliun pada Maret mendatang plus USD900 miliar dipengujung 2019. Kebijakan ini memang mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Jumlah anggaran yang besar itu berasal dari utang, lagi-lagi mirip yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya guyuran triliun dolar AS itu bukan tanpa risiko. Risiko gagal bayar akan membuat ekonomi AS suram meskipun kebijakan yang populis itu didukung oleh kalangan pengusaha AS.

Tak hanya soal kebijakan dalam negerinya saja yang dinanti dunia, kebijakan luar negeri Biden juga sangat dinantikan. Banyak negara yang berharap perang dagang antara AS dengan China yang berlangsung di era presiden Donald Trump segera usai. Namun Amerika tetaplah Amerika. Meskipun dua kubu berseteru, untuk urusan kebijakan luar negeri Amerika membawa ciri khasnya tersendiri.

Lalu apa dampak kebijakan progresif Biden bagi negara-negara berkembang? Tentu saja dampaknya belum akan terasa dalam waktu dekat. Tapi sejarah menunjukkan, negara-negara berkembang kurang beruntung apabila berhadapan dengan AS. Contohnya tuduhan antidumping, antisubsidi, atas produk biofuel dari Indonesia di era Barrack Obama sehingga hingga saat ini biofuel tidak bisa lagi diekspor ke AS karena tuduhan antisubsidinya dimenangi AS di level domestik maupun di level organisasi perdagangan dunia (WTO).

Tak hanya itu, Indonesia pernah masukke dalam "jebakan" AS di era Donald Trump tatkala status Indonesia sebagai negara berkembang dicabut dan dimasukkan ke dalam negara maju di (WTO). Perubahan status tersebut tentunya terlihat keren, tetapi yang tidak disadari kebijakan itu berpotensi memukul neraca perdagangan Indonesia.

Sebab gara-gara pencabutan status ini, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas *generalize system of preference* (GSP) berupa keringanan bea masuk. Padahal Bank Dunia mencatat nilai *gross national income* (GNI) Indonesia per 2018 baru mencapai USD3.840, jauh di bawah batas minimum GNI senilai USD12.235 yang akan mendapat pengecualian insentif GSP dari AS. Menurut data Bank Dunia dengan nilai itu, Indonesia belum masuk kategori negara berpendapatan atas atau negara maju.

Karena itu apabila impor AS dari Indonesia, dengan status sebagai negara maju, menggunakan tarif normal atau *most favoured nation* (MFN), industri Indonesia bakal kehilangan daya saing. Sebelum Covid-19, AS menduduki posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor Indonesia setelah China.

Terpilihnya Joe Biden direspons positif oleh pasar, tak hanya di kawasan Amerika, tetapi hampir di seluruh dunia. Biden diyakini akan membawa kebijakan yang lebih akomodatif bagi pasar global, termasuk surat utang Indonesia.

Dengan serangkaian kebijakannya yang sudah dikumandangkan saat debat pilpres tahun lalu, apa yang akan dilakukan Biden diyakini meningkatkan minat investor asing untuk memasuki atau kembali ke pasar Indonesia. Kebijakan AS di bawah kepemimpinan presiden baru juga diharapkan akan berdampak baik bagi pasar saham global sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Harapannya, di bawah kepemimpinan Biden, AS akan lebih fokus pada perbaikan ekonomi yang lebih harmonis dengan mitra dagangnya. Semoga saja pelantikan Biden sebagai presiden AS akan memberikan dampak positif seiring dengan adanya harapan baru bagi pemulihan ekonomi AS dan dunia. □

Bencana Banjir dan Paradigma "Degrowth"

MUHAMAD KARIM

Dosen Universitas Trilogi Jakarta, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Setiap awal tahun di Indonesia pasti curah hujannya tinggi. Imbasnya bencana alam banjir dan tanah longsor tak bisa dihindari. Apalagi kawasan hutan rusak, daerah aliran sungai (DAS) alami sedimentasi hingga buangan sampah sembarangan. Otomatis kala hujan banjir tak terhindarkan. Awal 2021 ini, banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya, Bener Meriah, Aceh, Sumedang, Jawa Barat, Tanjung pinang, Kepulauan Riau dan berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Banjir disertai tanah longsor ini telah memakan korban jiwa dan harta benda masyarakat. Di samping itu aktivitas produksi (tanaman pangan), transportasi dan rantai pasok terhambat dan terancam lumpuh.

Kondisi kian mengkhawatirkan karena situasinya di tengah wabah pandemi Covid-19. Artinya, rakyat yang mengalami bencana mesti superhati-hati dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya ancamannya bersifat ganda. Bencana banjir sekaligus wabah Covid-19. Situasinya berat memang. Pemerintah pusat dan daerah lewat Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) telah bekerja ekstrakeras agar rakyat selamat sekaligus tak terinfeksi wabah.

Mengapa Banjir?

Seakan telah jadi ritual banjir disertai tanah longsor melanda negeri ini di awal tahun. Kita terkesan tak siap menghadapinya. Ketika banjir melanda barusadar. Tentusudahterlambat. Nasi sudah jadi bubur. Banjir rutinitas ini sesungguhnya bukan sekedar bencana alam semata. Aktivitas manusia telah jadi pemicu sekaligus penyebabnya. Keserakahan manusia mengeksploitasi sumberdaya hutan dan merusak ekosistem jadi biang keroknya (antroposentrisme). Manusia mengabaikan kaidah-kaidah ekologi dan konservasi. Degradasi, deforestasi dan fragmentasi habitat muncul di beberapa daerah yang dulunya hutan. Kondisi ini kian parah berkelindan dengan perubahan iklim global. Indikasinya, awal musim hujan dan kemarau setiap tahunnya tak menentu. Akibatnya, tatkala musim dengan curah hujan tinggi banjir menerjang apapun, mulai dari perkotaan, perdesaan terutama sentral-sentral pertanian.

Pemerintah memang telah mengupayakan program reboisasi hutan, penghijauan sempadan sungai dan gerakan kali bersih selama beberapa dekade terakhir. Tapi, hasilnya belum maksimal. Justru alih fungsi lahan dan pembabatan hutan kian marak. Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan laju deforestasi/penebangan hutan di Indonesia sepanjang 2013- 2017 capai 1,47 juta ha/ tahunnya. Angka ini naik ketimbang kurun-waktu 2009-2013 sebesar 1,1 juta ha/tahunnya. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2000 sebesar 1,5 juta ha/ tahun. Angka-angka ini kian mengkhawatirkan. Apalagi Papua yang hutannya masih relatif luas juga kian terancam.

Riset organisasi Mighty Earth pada 2019 mencatat bahwa lebih dari 59 ribu hektare lahan telah dibuka di Papua sepanjang 2013-Mei 2016. Seluas 30 ribu hektar dibuka perusahaan dan merupakan kategori hutan primer. Bahkan sekitar 75 ribu hektare lagi terancam dibuka. Situasi ini tentu jadi lampu merah bagi pemerintah menyangkut hutan Papua. Pada 2019, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Sentani.

Penyebabnya, adalah tingginya intensitas hujan dan gundulnya hutan Pegunungan Cyclops. Dua dekade sebelumnya, pada 2010 banjir bandang juga menerjang Wasior, Papua Barat. Kedua kejadian yang berselang satu dekade tersebut telah memakan korban jiwa, harta benda, rumah warga dan infrastruktur, fisik. Penulis tak bisa membayangkan bagaimana nasib rakyat kita dua dekade ke depan bila deforestasi, kerusakan ekologi dan perilaku serakah manusia tak dihentikan? Mungkinkan manusia bakal hidup nyaman dan aman dari ancaman bencana?

Mungkinkah Degrowth?

Sepanjang dua dekade terakhir kalangan ilmuwan kritis dan gerakan masyarakat sipil dunia yang konsen terhadap keberlanjutan sumberdaya alam, ekologi dan kehidupan umat manusia mengajukan paradigma baru dalam pembangunan. Mereka mengusulkan konsep *degrowth* dalam semua sendi kehidupan. Pasalnya kecepatanan eksploitasi sumberdaya alam dan kerusakan ekologi tak sebanding dengan kecepatan pemulihannya.

Inilah yang disebut *decoupling* sumberdayaalam dan ekologi akibat ketidakseimbangan itu. Paradigma *degrowth* ini berkembang semenjak tahun 1970-an. Tapi, iajaditren dalam ranah intelektual kritis dan gerakan masyarakat sipil jelang tahun 2000-an kala isu perubahan iklim global jadi sentral. Paradigma ini timbul akibat terma pertumbuhan (*growth*) dianggap gagal menciptakan kesejahteraan sekaligus keberlanjutan sumberdaya alam dan ekologinya.

Degrowth merupakan suatu proses kolektif-deliberatif yang mengendalikan mekanisme pasar serta menjamin pertukaran barang dan jasa secara adil bagi kehidupan manusia (Schneider et al, 2013). Ia juga memprioritaskan jaminan kualitas hidup manusia ketimbang kuantitas, kooperasi ketimbang kompetisi, hingga mewujudkan keadilan sosial (Latouche, 2003). Dari kaca mata ekologi-ekonomi, ia menjamin keberlanjutan sosial dan mengatasi ketidakadilan ekonomi (Kallis, 2010).

Degrowth juga menjamin keberlanjutan ekologis, pengelolaan ekonomi secara partisipatif, pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup manusia yang lebih baik hingga memproduksi keadilan distributif, baik ruang maupun sumberdayanya (Research and *Degrowth*, 2010). Memang paradigma ini amat ideal dan terkesan utopis. Penjelasan sederhananya, paradigma *degrowth* dapat diilustrasikan dalam kehidupan biologi hewan dan tumbuhan yang tetap menjamin keberlanjutan ekosistem/ekologis secara alamiah. Mirip proses metabolisme dalam tubuh manusia. Apabila manusia mengonsumsi makanan secara berlebihan tanpa mempertimbngkan efek bagi kesehatannya.

Maka, proses metabolisme tubuhnya bakal terganggu. Imbasnya timbul aneka penyakit kronis; jantung, darah tinggi, hingga obesitas. Pasalnya, tubuh manusia tak bisa memaksakan pasokan asupan makanan tanpa kendali. Manusia mesti mempertimbangkan ekologi tubuhnya sehingga proses metabolisme tetap berlangsung normal. Bila, manusia mengasumsikan "asupan" makanan berlebihan, ia sama artinya berorientasi "pertumbuhan". Imbasnya, menderita penyakit kronis hingga berujung kematian. Sama artinya ulah manusia mengejar pertumbuhan ekonomi lewat eksploitasi sumber daya alam, merusak ekologi dan mengabaikan metabilisme alamiahnya (antroposentrisme). Maka, wajar saja bencana kematian menghantuinya (Karim, 2013). Jika ditransformasikan dalam kasus banjir bandang dan tanah longsor, mau tidak mau pilihan paradigma *degrowth* sebagai alternatif dalam implementasi pembangunan jadi kenicayaan.

Apakah paradigma ini sudah ada dalam praksisnya? Setidaknya penulis telah menemukan ragam aplikasi *degrowth* dalam ranah perumahan (*housing for degrowth*) (Nelson dan Schneider, 2019), pariwisata (*degrowth in tourism*) (Andriotis, 2018), kehidupan masyarakat sub-urban (*degrowth in the Suburbs*) (Alexander dan Gleeson, 2019) dan pertanian agroekologi (Gliessman 2007, Wojtkowski 2019). Kallis *et al* (2020) dalam buku barunya berjudul "*The case for degrowth*" mempertanyakan secara kritis bahwa apa yang bakal terjadi selama pandemi Covid-19 jika tak memptaktikan *degrowth*? Bukankah praktik *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bentuk *degrowth*? Tujuannya adalah memperlambat penyebaran Covid-19 dan meminimalisasi bahaya manusia. Sama halnya mendegrowth hutan kita.

Tujuannya membatasi deforestasi dan dampaknya bagi manusia serta sistem yang mengganggu metabolisme planet bumi. Dibuku ini dijelaskan panjang lebar pentingnya *degrowth* di tengah pandemi Covid-19 yang kiniancamkehidupan umat manusia. Soal pengelolaan sumberdaya hutan, perikanan dan pertambangan serta ekologi yang dikaitkan perubahan iklim, Peter A Viktor (2008) telah mengontruksi paradigma *degrowth* secara panjang lebar dalam bukunya berjudul *"Managing Without Growth, Slower by Design, Not Disaster"*. Inilah paradigma alternatif dalam konsep pembangunan di masa mendatang yang meminimalisasi degradasi sumberdaya alam dan ekologi.

Timbul pertanyaan, apakah paradigma *degrowth* ini mengabaikan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah? Apakah bakal memperlambat pertumbuhan atau meniadakannya? Dalam paradigma *degrowth*, pertumbuhan bakal dihasilkan di bagian akhir dari pendekatan ini. Apabila aktivitas yang berlangsung telah mencapai pemerataan pendapatan, keadilan ekonomi, dan keadilan ekologi yang berkelanjutan. Otomatis, pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan bakal tercipta secara nasional maupun regional. Pendek kata, jika paradigma *degrowth* ini dipraksiskan dalam kehidupan sosial, ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan ekologi serta pembagunan infrastruktur di masa datang, setidaknya menyelamatkan kehidupan umat manusia dan planet bumi ini dari aneka ancaman bencana. Mungkinkah? Amat mungkin jika kita dan seluruh komponen bangsa menghendakinya. Supaya terhindar ancaman banjir di awal tahun Semoga! □